

**PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PEDESAAN (PNPM-MP) MELALUI KEGIATAN SIMPAN
PINJAM KHUSUS PEREMPUAN (SPP) DI KECAMATAN
LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi
Ilmu Administrasi Negara sebagai salah satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

**WIRA FARLIAN
TM/NIM: 97326 / 2009**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

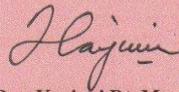
Judul : Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Melalui Kegiatan Simpan Pinjam
Khusus Perempuan (SPP) Di Kecamatan Lubuk Sikaping
Kabupaten Pasaman

Nama : Wira Farlian
TM/NIM : 2009/97326
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 10 Januari 2014

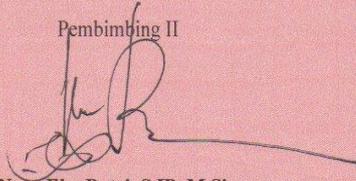
Disetujui Oleh

Pembimbing I



Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si
NIP. 19630617 198903 1 003

Pembimbing II



Nora Eka Putri, S.IP. M.Si
NIP. 19850312 200812 2 006

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

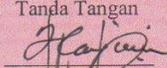
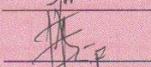
Pada Hari Kamis Tanggal 16 Januari 2014 pukul 15.00 s/d 17.00 WIB

**Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Pedesaan (PNPM-MP) Melalui Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan
(SPP) Di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman**

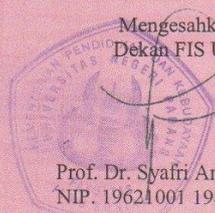
Nama : Wira Farlian
TM/NIM : 2009/97326
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 16 Januari 2014

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Karjuni Dt.Maani, M.Si	
Sekretaris	: Nora Eka Putri, S.IP, M.Si	
Anggota	: Drs. Yasril Yunus, M.Si	
Anggota	: Dr. Fatmariza, M.Hum	
Anggota	: Estika Sari, SH	

Mengesahkan :
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wira Farlian
TM/NIM : 2009/97326
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Melalui Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sesungguhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 24 Januari 2014
Saya yang menyatakan,



Wira Farlian
2009/97326

ABSTRAK

WIRA FARLIAN. 97326/2009. PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM-MP) MELALUI KEGIATAN SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN (SPP) DI KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN

Penelitian ini dilatar belakangi adanya ketidakmerataan pendapatan terutama terjadi di wilayah pedesaan. Faktor kemiskinan tentu menjadi salah masalah penting yang harus disikapi oleh pemerintah, kurang meratanya pendapat masyarakat mendorong terjadinya berbagai kecemburuan sosial, seperti tingginya aktifitas kriminalitas, atau pun masalah sosial lainnya. Untuk menciptakan pemerataan pendapatan, beberapa kelompok wanita membuat kelompok usaha berskala mikro. Usaha utama yang dikembangkan meliputi usaha di sektor pertanian dan perdagangan. Ide tersebut mengalami kendala, terutama dalam hal dana. Oleh sebab itu pemerintah membuat kegiatan simpan pinjam khusus perempuan (SPP). Program tersebut dijalankan oleh PNPM-MP. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kecamatan Lubuk Sikaping. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PNPM-MP, dan sejumlah masukan atau solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dalam penelitian tersebut peneliti mencoba mendeskriptifkan, mencatat, menjelaskan dan memaparkan tentang pelaksanaan, kendala dan solusi dalam menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan melalui kegiatan simpan pinjam khusus perempuan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Untuk mendapatkan data dan informasi digunakan informan yaitu pihak pelaksana PNPM-MP dan anggota kelompok perempuan yang menerima dana. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah snowball sampling. Data yang digunakan adalah primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan atau pengamatan, wawancara, studi dokumentasi dan menggunakan alat pengumpulan data seperti handphone yang digunakan dalam proses wawancara. Sebelum dilakukan proses interpretasi data maka dibuat tabulasi, untuk melakukan analisis data maka digunakan teknik analisis deskriptif yaitu dengan cara menjabarkan hasil observasi atau pun proses wawancara yang dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PNPM-MP banyak mengalami kendala terutama dalam pengembalian dana pinjaman dari anggota ke petugas, oleh sebab itu perlu diupayakan peran aktif dari seluruh anggota kelompok wanita dan petugas PNPM-MP agar kegiatan tersebut dapat berjalan lebih baik dimasa mendatang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Melalui Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”**. Salawat dan salam dimohonkan kepada-Nya untuk dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana strata satu (S1) dengan gelar Sarjana Administrasi Publik pada jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak M. Fachri Adnan, M.Si.Ph.D dan Ibu Henni Muchtar, SH.MH selaku ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik.
3. Bapak Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D sebagai Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Nora Eka Putri, S.IP.M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si, Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum, Ibu Estika Sari, SH selaku penguji yang telah berkenan meluangkan waktu disela-sela kesibukan untuk memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Hj. Maria Montessori, M.Ed, M.Si sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menjalankan perkuliahan.
8. Bapak Rilfahendry Ahda, SE sebagai Ketua UPK Lubuk Sikaping yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam mengumpulkan penelitian.
9. Ibu Febria Nelsya, SH sebagai Sekretaris UPK Lubuk Sikaping dan semua Staf UPK Lubuk Sikaping yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
10. Ibu-Ibu Kelompok Perempuan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi.
11. Teristimewa untuk Kedua Orang Tuaku yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis secara moral maupun material serta doa untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan terutama bagi rekan-rekan IAN 2009 yang telah memberikan masukan dan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua bimbingan, bantuan, masukan, kritikan, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dari penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua.

Padang, Januari 2014

Wira Farlian

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DARTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi, Batasan dan Perumusan Masalah.....	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Batasan Masalah.....	7
3. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis.....	10
1. Konsep Kemiskinan	10
2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	13
3. Program Nasional Pemeberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)	16
4. Landasan Hukum Pelaksanaan Program	19
5. Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan.....	21
B. Kerangka Konseptual	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Peneltian	30
C. Informan Penelitian	31
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data	32
1. Jenis dan Sumber Data	32
2. Teknik Pengumpulan Data.....	33
3. Alat Pengumpulan Data	35
E. Uji Keabsahan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	40
1. Gambaran Umum Kecamatan Lubuk Sikaping	40
a. Letak Geografis	40
b. Penduduk	41
c. Rumah Tangga Miskin	44
d. Sejarah Berdirinya PNPM-MP.....	46
B. Temuan Khusus	49
1. Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.....	50
2. Kendala-kendala yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman	62
3. Upaya Mengatasi Kendala-kendala yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman	67
C. Pembahasan	72
1. Pelaksanaan Simpan Pinjam Khusus Perempuan di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman	73
2. Kendala-kendala yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman	76
3. Upaya Mengatasi Kendala-kendala yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar nama Kecamatan di Kab. Pasaman	5
Tabel 1.2 Daftar nama Nagari di Kec. Lubuk Sikaping	6
Tabel 3.1 Nama Informan	32
Tabel 3.2 Jenis, Teknik dan Alat Pengumpulan Data	36
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Per Nagari	42
Tabel 4.2 Kondisi Kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) Per Desember 2012	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	29
Gambar 4.1 Peta Kecamatan Lubuk Sikaping	41
Gambar 4.2 Salah Satu Warung Anggota Kelompok SPP Melati	59
Gambar 4.3 Komoditi Kulit Manis SPP Suko Basamo Jorong Koto Tinggi Nagari Sundata	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) merupakan Program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program – program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

Lingkup kegiatan PNPM – Mandiri Pedesaan pada prinsipnya adalah peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin Pedesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat (terutama

masyarakat miskin, kelompok perempuan dan komunitas/kelompok yang terpinggirkan), meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, meningkatkan modal sosial masyarakat serta inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna (Departemen Dalam Negeri, 2007:1).

Dalam memberikan dukungan terhadap PNPM Mandiri Pedesaan yang mempunyai tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan maka kegiatan pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi Rumah Tangga Miskin. Salah satu bentuk pemberdayaan yang dikelola oleh PNPM Mandiri adalah kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP). Program ini merupakan kegiatan pemberian modal untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.

kegiatan simpan pinjam khusus perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan menyimpan dan meminjam. Terkait kegiatan pemberian permodalan kepada kelompok perempuan perlu adanya manajemen dan pengelolaan yang baik terhadap dana SPP tersebut, sehingga keberlanjutan program bisa tercapai. Dalam hal ini kegiatan SPP yang menjadi jembatan adalah adanya dana yang akan di simpan ataupun di pinjamkan berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan.

Sasaran utama pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dengan program SPP ini adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan

sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam khusus perempuan yang sudah berkembang di masyarakat. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pemerintah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) tertuang dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM MP, yang menyatakan dengan adanya kegiatan dana bergulir PNPM - MP dapat :

1. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha
2. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program;
3. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah Pedesaan;
4. Menyiapkan kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan (dan lembaga pendukung lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan
5. Peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat. (Departemen Dalam Negeri, 2007:1)

Menurut Ratna (1999: 5) berdasarkan penelitian mengenai strategi kehidupan perempuan kepala rumah tangga, tercatat adanya bermacam-macam penyebab perempuan menjadi kepala rumah tangga. Diantaranya adalah faktor perceraian, sehingga perempuan harus menanggung biaya hidupnya sendiri atau bersama anaknya, atau perempuan tersebut merantau tanpa suami, atau perempuan itu ditinggal merantau oleh suaminya dan

berumah tangga sendiri. Hal ini berlaku pula untuk rumah tangga dengan kehadiran suami, namun dikarenakan lemah secara fisik atau mental, sehingga tidak mampu mengelola rumah tangga.

Dalam kerangka pemberdayaan perempuan, program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan kegiatan simpan pinjam khusus perempuan ini telah membuka jalan bagi kelompok perempuan miskin dan yang tidak bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan, dimana mereka dapat meminjam uang setiap saat dengan prosedur yang gampang, bunga yang murah, dan keuntungan pun akan kembali untuk mereka. Pinjaman dapat dipergunakan untuk pengembangan usaha, biaya sekolah anak, dan juga kebutuhan sehari-hari yang mendesak. Dengan demikian, dengan adanya program kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan ini bisa merubah kondisi di dalam masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, semakin baiknya pendidikan di keluarga petani, menurunnya kemiskinan, dan menurunnya angka pengangguran, sehingga masyarakat bisa merasakan kemakmuran hidup dengan adanya program ini khususnya anggota kelompok itu sendiri.

Berdasarkan data yang didapat dari kantor Kecamatan Lubuk Sikaping jumlah penduduk Kecamatan Lubuk Sikaping April 2013 adalah 39.234 jiwa dimana 9.641 diantaranya adalah penduduk miskin. Dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini khususnya dalam Simpan Pinjam perempuan masyarakat dapat lebih sejahtera dan makmur terutama dalam sektor peningkatan perekonomian, dimana tujuan dari Simpan Pinjam khusus

Perempuan ini adalah untuk memberikan atau meningkatkan kegiatan usaha yang ada pada masyarakat.

Kecamatan Lubuk Sikaping adalah salah satu dari dua belas Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman dimana Kecamatan Lubuk Sikaping dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) lebih aktif dalam menjalankan kegiatan-kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan sebagaimana yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan di Kecamatan Lubuk Sikaping dilaksanakan di lima Nagari dari enam Nagari yang ada yaitu Nagari Tanjung Beringin, Durian Tinggi, Pauh, Air Manggis dan Sundatar sedangkan Nagari Jambak tidak ikut karena sudah mempunyai kegiatan simpan pinjam sendiri.

Tabel 1.1
Daftar nama Kecamatan di Kab. Pasaman

No.	Nama Kecamatan
1	Lubuk Sikaping
2	Tigo Nagari
3	Bonjol
4	Simpang Alahan Mati
5	Dua Koto
6	Panti
7	Padang Gelugur
8	Rao
9	Mapat Tunggal
10	Mapat Tunggul Selatan
11	Rao Selatan
12	Rao Utara

Sumber: Kantor Kec. Lubuk Sikaping 2013

Tabel 1.2
Daftar nama Nagari di Kec. Lubuk Sikaping

No.	Nama Nagari	Keterangan
1	Tanjung Beringin	Mengikuti kegiatan SPP
2	Durian Tinggi	Mengikuti kegiatan SPP
3	Pauh	Mengikuti kegiatan SPP
4	Air Manggis	Mengikuti kegiatan SPP
5	Sundatar	Mengikuti kegiatan SPP
6	Jambak	Tidak mengikuti kegiatan SPP

Sumber: Kantor Kec. Lubuk Sikaping 2013

Namun dalam kenyataannya (berdasarkan hasil wawancara dengan Febria Nelsya yang menjabat sebagai Sekretaris UPK), pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan terdapat beberapa masalah. Permasalahan yang paling mendasar dalam pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat simpan pinjam perempuan di Kecamatan Lubuk Sikaping yaitu masih terdapatnya hambatan dalam pengelolaan pinjaman yang mempengaruhi pelaksanaan SPP, seperti pengelolaan pinjaman bermasalah seperti orang yang meminjam sering terlambat dalam mengembalikan pinjaman yang mengakibatkan orang yang meminjam tersebut dikenakan denda dimana akan membuat para peminjam akan lebih berat dalam mengembalikan dana tersebut.

Hambatan selanjutnya dalam pengelolaan Simpan Pinjam khusus Perempuan adalah masih rendahnya tingkat penggunaan dana oleh masyarakat karena dalam pengelolaan dana masyarakat tersebut tidak bisa mengembangkan usaha yang dikelola dengan baik.

Dalam pelaksanaan pengelolaan adanya penggunaan dana oleh pengelola SPP yang tidak tepat sasaran dan pelaksanaan kegiatan SPP ini belum sesuai dengan kerangka pemberdayaan perempuan, karena penyaluran

dana untuk pengajuan/peminjaman modal tidak sesuai dengan proposal yang diajukan. Disisi lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan SPP ini masih adanya anggota kelompok fiktif untuk mendapatkan dana lebih.

Berdasarkan uraian, penulis tertarik untuk memahami bagaimana pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP), yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Melalui Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”**

B. Identifikasi, Batasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian di atas dan keterangan yang dikemukakan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan pinjaman bermasalah
- b. Keterlambatan dalam pengembalian dana pinjaman.
- c. Masih rendahnya tingkat penggunaan dana bagi sipenerima pinjaman.
- d. Pengelolaan SPP masih rendah.
- e. Masih adanya penyelewengan dana oleh pengurus SPP.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan dapat mempertajam objek pembahasan maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

(PNPM-MP) kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan tersebut, tingkat penggunaan dana oleh masyarakat, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dapat di rumuskan permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan program kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman?
- b. Apa saja kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman?
- c. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman?

C. Tujuan penelitian

Dalam hal ini tujuan penulis adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
3. Untuk mendeskripsikan tindak lanjut mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian diharapkan berguna sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Untuk pengembangan konsep ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.
2. Secara praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah agar dapat merencanakan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Simpan Pinjam khusus Perempuan yang lebih baik dimasa yang akan datang.
 - b. Sebagai pedoman untuk masyarakat dalam memahami pelaksanaan kegiatan simpan pinjam khusus perempuan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Kemiskinan

Secara umum, ada dua pandangan dalam melihat kemiskinan yang eksis pada suatu wilayah. Kemiskinan bisa dilihat sebagai suatu fenomena yang direpresentasikan oleh upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Pada sisi lain, kemiskinan dilihat sebagai suatu proses. Menurut pandangan ini, eksisnya kemiskinan pada suatu wilayah merupakan akibat dari suatu proses yang sistematis yang mencakup dimensi waktu dan sistem. Kedua pandangan ini tentunya menimbulkan persepsi dan implikasi yang berbeda dalam mendesain strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pandangan pertama lebih berdimensi jangka pendek, sedangkan pandangan kedua lebih berdimensi jangka panjang, karena pandangan kedua lebih menyentuh akar penyebab kemiskinan baik pada tataran makro regional maupun pada tataran mikro. (Muslim, 2006: 25).

Sebagaimana diketahui, sejak terjadinya krisis moneter dan ekonomi pada 1997, jumlah penduduk miskin meningkat lagi secara drastis. Krisis tersebut, antara lain, telah menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan karena merosotnya investasi dan ditutupnya usaha manufaktur, industri dan konstruksi, serta berbagai jenis usaha lainnya. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama

sekitar 25 tahun sebelumnya telah sirna dalam waktu yang singkat.(Muslim, 2006: 32).

Sedikitnya ada dua macam perspektif yang lazim dipergunakan untuk mendekati masalah kemiskinan, yaitu perspektif kultural (*cultural perspective*), dan perspektif struktural atau situasional (*situasional perspective*).

Masing-masing perspektive memiliki tekanan, acuan dan metodologi tersendiri, dalam menganalisis kemiskinan. Perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan pada tiga tingkat analisis, individu, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individu kemiskinan ditandai dengan sifat yang lazim disebut “*a strong feeling of marginality*” seperti apatisme, fatalisme atau pasrah pada nasib, boros, tergantung, dan *inferior*.

Pada tingkat keluarga, kemiskinan ditandai dengan jumlah anggota keluarga yang besar dan *free union or consensual marriages*. Pada tingkat masyarakat, kemiskinan terutama ditunjukkan oleh tindakan terintegrasinya kaum miskin dengan institusi-institusi masyarakat secara efektif. Mereka seringkali memperoleh perlakuan sebagai obyek yang perlu digarap dari pada sebagai subyek yang perlu diberi peluang untuk berkembang.

Sedangkan menurut perspektif situasional, masalah kemiskinan dilihat sebagai dampak dari sitem ekonomi yang mengutamakan akumulasi kapital dan produk-produk teknologi modern. Penetrasi kapital antara lain mengejewantah dalam program-program pembangunan yang dinilai lebih mengutamakan pertumbuhan dan kurang memperhatikan

pemerataan hasil pembangunan. Program-program itu antara lain berbentuk intensifikasi, ekstensifikasi, dan komersialisasi pertanian untuk menghasilkan pangan sebesar-besarnya guna memenuhi kebutuhan ekspor. (Roesmidi, 2006: 91-92).

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Intinya mencakup :

- a. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan dan pelayanan kesehatan
- b. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
- c. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai disini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi diseluruh dunia. (Soeharto : 2005)

Menurut Soeharto (2005) kemiskinan memiliki beberapa ciri yaitu :

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan)
- b. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
- c. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam.
- d. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat

- e. Ketiadaan akses terhadap lapangan pekerjaan dan pencaharian yang berkesinambungan
- f. Ketidakmampuan berusaha karena cacat fisik maupun mental.
- g. Ketidakmampuan dan ketidak beruntungan sosial (anak terlantar, janda miskin, dll).

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya tidak hanya ditujukan secara individual, akan tetapi juga secara kolektif (*individual self empowerment* maupun *collective self empowerment*), sebagai bagian dari aktualisasi eksistensi manusia, dengan demikian “manusia” dijadikan sebagai tolak ukur normatif, yang menempatkan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga dan masyarakat bahkan bangsa sebagai aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karenanya dalam pemberdayaan masyarakat perlu pengenalan akan hakekat manusia yang diharapkan dapat memberi sumbangan ataupun menambah wawasan ketika menerapkan konsep atau program pada masyarakat. (Roesmidi, 2006: 16).

Menurut konsep John Friedmann dalam Roesmidi (2006: 13), pemberdayaan masyarakat harus berawal dari pemberdayaan setiap rumah tangga yang mencakup tiga hal:

- a. *Pemberdayaan sosial ekonomi* yang difokuskan pada upaya menciptakan akses bagi setiap rumah tangga dalam proses produksi seperti akses informasi, pengetahuan dan keterampilan, akses untuk

berpartisipasi dalam organisasi sosial dan akses kepada sumber-sumber keuangan.

- b. *Pemberdayaan politik* difokuskan pada upaya menciptakan akses bagi setiap rumah tangga ke dalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depannya. Pemberdayaan politik masyarakat tidak hanya sebatas proses pemilihan umum, akan tetapi juga kemampuan untuk mengemukakan pendapat, melakukan kegiatan kolektif atau bergabung dalam berbagai asosiasi politik, gerakan sosial atau kelompok kepentingan.
- c. *Pemberdayaan psikologis* difokuskan pada upaya membangun kepercayaan diri bagi setiap rumah tangga yang lemah. Kepercayaan diri pada hakekatnya merupakan hasil dari proses pemberdayaan sosial ekonomi dan pemberdayaan politik.

Berkenaan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, inti dari pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan, memperkuat potensi atau daya, dan terciptanya kemandirian. Berarti pemberdayaan tidak hanya terjadi dalam masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, tetapi juga pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas dan dapat dikembangkan sehingga mencapai kemandirian.

Ada tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk kepada :

- a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.

- b. Sebuah keadaan psikologis yang di tandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- c. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah stuktur-struktur yang masih menekan. (Parson: 1994)

Masyarakat yang berdaya akan mampu dan kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mampu mengawasi jalannya pembangunan dan juga menikmati hasil pembangunan, adapun unsur-unsur pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah :

- a. Kemampuan politik yang mendukung
- b. Suasana kondusif untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh
- c. Motivasi
- d. Potensi Masyarakat
- e. Peluang yang tersedia
- f. Kerelaan mengalihkan wewenang
- g. Perlindungan
- h. *Awareness* (kesadaran) (suhendra 2006:86)

3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)

a. Pengertian PNPM

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah:

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulant untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai (<http://www.pnpm-mandiri.org> di akses tanggal 23 mei 2013 jam 21.45 WIB).

b. Visi dan Misi PNPM Mandiri Pedesaan

Visi PNPM Mandiri Pedesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri Pedesaan adalah:

- 1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
- 2) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
- 3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal.
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.
- 5) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Pedesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Pedesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Pedesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang

dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

c. Tujuan PNPM Mandiri Pedesaan

Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Tujuan khususnya meliputi:

- 1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
- 2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
- 3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
- 4) Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
- 5) Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
- 6) Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa.

- 7) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

d. Klasifikasi PNPM – Mandiri Pedesaan

Usulan kegiatan yang bisa didanai melalui PNPM –Mandiri Pedesaan bisa diklasifikasikan atas 4 jenis yaitu:

- 1) Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin
- 2) Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan nonformal)
- 3) Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal)
- 4) Penambahan Permodalan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan.

e. Peran Kepala Desa dalam PNPM-MP

Peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di desa. Bersama BPD, kepala desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelebagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Pedesaan sebagai pola pembangunan

partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kepala desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan badan kerja sama antar desa.

Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa:

- 1) membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat di wilayahnya.
- 2) Mewakili desanya dalam urusan kerja sama antar desa di dalam MAD.
- 3) Mengoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan yang ada di desa.
- 4) Mengoordinasikan pelaksanaan dan hasil pendataan RTM setiap dusun.
- 5) Membantu dan mendorong terlaksananya MMDD dan pemanfaatan hasil MMDD dalam penyusunan RPJMDes serta tahapan pelaksanaan lain di desa.
- 6) Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD).
- 7) Turut menyelesaikan perselisihan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.
- 8) Memeriksa setiap laporan, termasuk laporan penyelesaian akhir kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan baik fisik, administrasi dan keuangan,

- 9) Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan seperti: Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan, dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K). (Departemen Dalam Negeri Penjelasan V, 2007:1)

4. Landasan Hukum Pelaksanaan Program

Dalam Standar Operasional Prosedur UPK disebutkan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lubuk Sikaping adalah lembaga yang dibentuk untuk mengelola kegiatan dana bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Lubuk Sikaping agar dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah lokal serta penyediaan sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi.

Untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan UPK dan Lembaga pendukungnya yang dibentuk melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) supaya berkembang, tertib dan terkendali perlu dibuat suatu aturan dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sesuai prosedur dan prinsip-prinsip PNPM-MP, sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004

Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4437)

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
- c. Permendagri Nomor 5 tahun 2007 tentang Kelembagaan Masyarakat
- d. Permendagri Nomor 67 tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa
- e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antar Nagari Kecamatan Lubuk Sikaping

Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pelestarian program tersebut maka undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 214 mengamanatkan perlunya kerjasama antar Nagari demi kepentingan Nagari-nagari di suatu wilayah dan didukung dengan PP 72/2005 serta surat edaran Mendagri nomor 414.2/1402/PMD tahun 2006 untuk mengintegrasikan kelembagaan ke dalam peraturan perundangan yang berlaku, maka perlu dilakukan pembentukan Badan Kerja-sama Antar Nagari (BKAN). Landasan ini berperan dalam rangka untuk memberikan adanya kepastian hukum untuk mengatasi hambatan dalam perlindungan dan pelestarian aset-aset PPK/PNPM dan atau program sejenis.

5. Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan

Kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.

Tujuan dan ketentuan dari kegiatan simpan pinjam khusus perempuan adalah:

a. Tujuan Umum

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan potensi kegiatan simpan pinjam Pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

b. Tujuan Khusus

- 1) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar
- 2) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.
- 3) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

c. Ketentuan dasar

- 1) Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan
- 2) Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan.
- 3) Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang professional oleh kaum perempuan dengan

mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dan bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.

- 4) Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat Pedesaan.
- 5) Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

d. Ketentuan Pendanaan

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) per kecamatan maksimal 25 % dari alokasi BLM.

e. Sasaran, Bentuk Kegiatan dan Ketentuan Kelompok SPP

1) Sasaran Program

Sasaran program adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam khusus perempuan yang sudah ada di masyarakat.

2) Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelola dana pinjaman.

3) Ketentuan kelompok SPP

Ketentuan kelompok SPP adalah sebagai berikut :

- a) Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan (terutama rumah tangga miskin), yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
- b) Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
- c) Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
- d) Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.
- e) Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

4) Jenis Kelompok

Sasaran jenis kelompok dalam kegiatan dana bergulir adalah :

- a) Kelompok Simpan Pinjam (KSP) adalah kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM.
- b) Kelompok Usaha Bersama (KUB) : adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh

anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM.

- c) Kelompok Aneka Usaha : adalah kelompok yang anggotanya Rumah Tangga Miskin yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual oleh anggota.

5) Fungsi Kelompok

Sasaran fungsi kelompok dalam melayani pemanfaat dana bergulir dibedakan menjadi :

- a) Kelompok Chaneling (penyalur) adalah kelompok yang hanya menyalurkan pinjaman dari UPK kepada pemanfaat tanpa mengubah persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh UPK.
- b) Kelompok Executing (pengelola) adalah kelompok yang mengelola pinjaman dari UPK secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kelompok, selanjutnya memberikan pelayanan kepada pemanfaat sesuai dengan kesepakatan antara kelompok dan pemanfaat.

6) Ketentuan Dasar

Pengelolaan dan bergulir dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana begulir dengan ketentuan dasar sebagai berikut :

a) Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir

Pelestarian penyediaan dana permodalan bagi usaha mikro adalah upaya yang mengarah pada pengembangan dana bergulir untuk permodalan mikro pada wilayah program.

Penyediaan dana permodalan tersebut merupakan kebutuhan prioritas masing-masing wilayah pada saat pelaksanaan program sehingga BLM telah dialokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Penyediaan dana bergulir tersebut merupakan hak masyarakat yang berdomisili pada wilayah program sehingga dalam upaya pelestarian dana bergulir tidak diperkenankan memindahkan hak pelayanan kepada masyarakat di luar lokasi wilayah tersebut.

Bentuk kegiatan dana bergulir adalah tetap menyediakan dana permodalan bagi pelaku usaha mikro di masyarakat dan tidak digunakan untuk menjalankan suatu usaha pada sector riil sehingga dalam upaya pelestarian dana bergulir tidak diperkenankan untuk mendanai kegiatan sector riil yang dijalankan oleh UPK.

b) Kemudahan akses pendanaan usaha bagi RTM

Kemudahan akses pendanaan bagi usaha mikro yang dilakukan oleh RTM yang tidak mempunyai akses langsung pada lembaga keuangan formal maupun informal.

c) Pelestarian Prinsip Pengelolaan

Prinsip-prinsip pengelolaan dana bergulir harus tetap mengacu pada prinsip PNPM Mandiri Pedesaan.

d) Pelestarian Kelembagaan

Pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM Mandiri Pedesaan seperti : UPK, Kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, dan sebagainya.

e) Pengembangan Kelompok

Dalam pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap memperhatikan pengembangan kelompok yang mempunyai anggota RTM. Misalnya memberikan kesempatan kepada kelompok untuk menambahkan permodalan melalui pembagian keuntungan UPK dengan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW).

B. Kerangka Konseptual

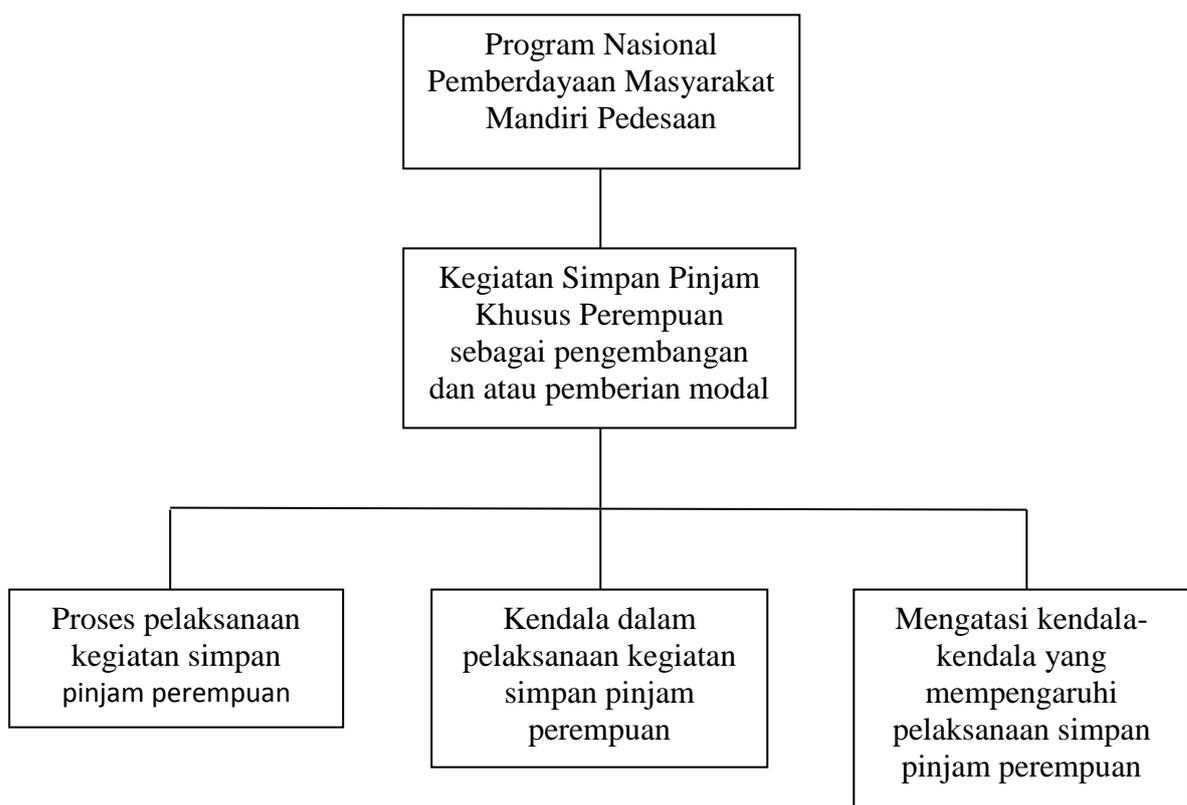
PNPM yang merupakan suatu kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan didanai oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaannya masih saja ada masyarakat yang belum mengetahui arti dan tujuan program tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dan pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, maupun

manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap PNPM itu sendiri yang masih kurang.

Berangkat dari masalah tersebut, pelaksanaan PNPM baik dalam hal sosialisasi maupun manfaat bisa memberikan manfaat melalui program tersebut. Apabila aparat pemerintah telah memahami hal tersebut, maka dalam pelaksanaan PNPM nantinya akan didapatkan hasil yang diharapkan oleh masyarakat.

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir dalam menggambarkan hubungan konsep yang akan diteliti. Berangkat dari latar belakang masalah dan kajian teoritis, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat dalam diagram berikut:

Bagan 2.1
Kerangka Konseptual



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil wawancara terbuka yang dilakukan kepada pihak pengelola dan peserta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) melalui kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan Pada Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman diperoleh hasil seperti terlihat dibawah ini:

1. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) melalui kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman telah dilaksanakan dengan baik, kegiatan tersebut didahului dengan pengajuan proposal dari calon kelompok penerima dana, varikasi dari team yang dibentuk kecamatan hingga penentuan kelayakan kelompok untuk menerima dana pinjaman, setelah tersebut dilakukan pencairan dana dilakukan dan diserahkan kepada ketua kelompok untuk dibagikan kepada anggota kelompok.
2. Didalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) melalui kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan. Terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh team pelaksana maupun anggota. Masalah atau kendala utama yang dihadapi team pelaksana berhubungan dengan tunggakan angsuran kredit, hingga masalah verifikasi kelayakan kelompok dalam meneriman dan pinjaman.

Kendala yang dihadapi oleh kelompok penerima pinjaman adalah kesulitan bagi mereka untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana pinjaman, masalah hingga masalah angsuran pinjaman.

3. Untuk mengatasi masalah atau kendala yang dihadapi organisasi, pihak organisasi harus mengeluarkan surat peringatan, ketika peringatan tidak dihiraukan oleh anggota kelompok yang bermasalah, sanksi tegas dalam bentuk pengurangan porsi pinjaman hingga penghentian pinjaman untuk kelompok dapat dilakukan, serta meningkatkan transparansi dalam menentukan kelompok penerima pinjaman dan prosedur hingga pencairan dana pinjaman. Bagi kelompok solusi terbaik yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan kekeluargaan, dengan cara menonjolkan peran ketua kelompok, dalam hal ini ketua kelompok akan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan anggota, langkah tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan program iuran wajib bagi anggota, yang dananya dapat digunakan untuk membayar angsuran pinjaman.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil wawancara pada sejumlah pihak yang berkompeten dengan masalah diajukan dapat diajukan beberapa saran yang dapat memberikan manfaat bagi:

1. Pengurus PNPM-MP Kecamatan Lubuk Sikaping disarankan untuk lebih meningkatkan transparansi didalam pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) melalui kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan, transparansi

dilakukan dari proses pendataan kelompok calon penerima pinjaman, proses verifikasi, hingga pencarian, transparansi dilakukan dengan cara mempublikasikan hasil investigasi terhadap data kelompok dan besarnya aliran dana pinjaman yang akan diberikan. Publikasi dapat dilakukan melalui media cetak atau pun media public lainnya.

2. Kelompok penerima pinjaman, disarankan untuk menyelenggarakan program iuran wajib dalam bentuk tabungan yang dikordinir melalui ketua, tujuan iuran tersebut adalah untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan angsuran pinjaman. Selain itu ketua kelompok harus dapat merrangkul berbagai pihak yang berkepentingan seperti pihak kelurahan untuk memberikan penyuluhan yang berguna bagi pengembangan dana yang diterima dari pinjaman dalam rangka pengembangan usaha.
3. Peneliti dimasa mendatang diharapkan untuk menggunakan ruang lingkup pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang berbeda, dan dilakukan pada wilayah observasi yang lebih luas, didalam penelitian dimasa mendatang diharapkan digunakan model analisis secara kuantitatif, saran tersebut sangat penting untuk meningkatkan ketepatan dan akurasi hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Burhan Bungin, 2003. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Dalam Negeri. 2007. PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.
- Edi Soeharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Ginandjar Kartasasmita. 1995. *Pemberdayaan Masyarakat : Sebuah Tinjauan Administrasi*. Malang: Unibraw Press.
- Lexy J Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muslim Kasim. 2006. *Karakteristik Kemiskinan di Indonesia dan Penanggulangannya*. Jakarta: Indomedia.
- Parsons, Ruth J. 1994. *The Integration of Social Work Practice*. Wadsworth, Inc., California
- Ratna batara munti. 1999. *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*. Jakarta: Yunani purba.
- Roesmidi dan Riza Risyanti. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Sri Edi Swasono, dkk. 1987. *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono. 2008. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra.2006.*Perturan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Alfabeta.

Jurnal:

Sinta Oktavia. 2012. Analisis Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) (Studi Kasus Pada Kelompok Wanita Cempaka Putih, Sungai Liku Tengah, Kenagarian Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan). E Journal Universitas Andalas 2012. Padang.

Siaga Basu Murbeng, Mochamad Saleh Soeaidy, dan Riyanto. 2012. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) (Studi Pada Desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung). Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol 1 No 5 Hal 1257 – 1265.

Sri Widayati. 2013. Pemberdayaan Ekonomi Melalui Dana Bergulir PNPM Mandiri Bagi Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Staten Kabupaten Semarang. Jurnal Ilmiah Inkoma Volume 24 Nomor 1 Februari 2013.

Tenasale Stella. 2012. Evaluasi Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) Dalam PNPM Mandiri Pedesaan (Studi Kasus Pada Kelompok SPP Nurul Iman di Desa Tulehu UPK Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah). Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Depok.

Internet:

http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=267. diakses tanggal 23 mei 2013 jam 21.45

Skripsi:

Dedi Zulherman 2011. *Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Peraturan:

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN). Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. *Standar Operasional Prosedur Unit Pengelola Kegiatan.* Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.